

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, I., 2009. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional (Studi di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI) (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S., Hogan, C.E., 2017. Auditing And Assurance Services : An Integrated Approach, 16th ed. Pearson Education, United States.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2011. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: PER-1390/K/SU/2011 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Badan Pusat Statistik, 2016a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2010, 2014, dan 2015.
- Badan Pusat Statistik, 2016b. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, 2015.
- COSO, 2013. Internal Control - Integrated Framework. COSO's organization. URL <https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf> (accessed 3.19.17)
- Creswell, J.W., 2014. Research Design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 4th ed. SAGE Publications, Inc, California.
- Delli, H., 2014. Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mengelola Belanja Bantuan Sosial (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah) (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Herdiansyah, H., 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Salemba Empat, Jakarta.
- Irianto, 2015. Korupsi Dana Kematian, Mantan Kadisos Bandar Lampung Dituntut 18 Bulan [WWW Document]. URL <http://www.saibumi.com/artikel-64945-korupsi-dana-kematian-mantan-kadisos-bandar-lampung-dituntut-18-bulan.html> (accessed 8.24.16).

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2011. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
- Kusmandhani, Y., 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pencairan Anggaran Belanja Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Lonto, M.P., 2011. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Good Governance (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri, 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Menteri Dalam Negeri, 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Menteri Dalam Negeri, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., 1994. *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed. SAGE Publications Inc, California.
- Moeller, R.R., 2009. *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge*, Seventh. ed. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Presiden Republik Indonesia, 1989. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Presiden Republik Indonesia, 1983. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Ritonga, I.T., 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. LKMPD: Yogyakarta.

Romney, M.B., Steinbart, P.J., 2006. *Accounting Information System*, 10th ed. Pearson Education, Inc, New Jersey.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Yin, R.K., 2013. Studi kasus : *Desain & Metode*. Rajawali Pers: Jakarta.